

## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE

Siska Wulansari

Siskawulansari758@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aims to examine the influence of good corporate governance and political connections to tax avoidance. In this research using good corporate governance mechanism that is managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioner and audit committee. Based on the analysis result can be concluded that managerial ownership and independent board of commissioner have positive influence to tax avoidance. While institutional ownership has a negative influence on tax avoidance, since institutional ownership entrusts all control and management of the company to independent commissioners. And the audit committee is negatively influenced by tax avoidance, because too many audit committee members are not good enough for the company because there are many tasks and jobs that will be divided. While the political connection does not influence the tax avoidance, because the company whose shares are mostly owned by the government are designated as low tax payers risk accordance with the Regulation of Minister of Finance No. 71 / PMK.03 / 2010. This regulation illustrates the belief that in companies whose majority share is owned by the government does not avoid tax evasion.*

*Keywords: tax avoidance, good corporate governance, political connections, SOEs.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari *good corporate governance* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini menggunakan mekanisme *good corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena kepemilikan institusional mempercayakan semua pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada komisaris independen. Dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena anggota komite audit yang terlalu banyak berakibat kurang baik bagi perusahaan karena ada banyak tugas dan pekerjaan yang akan terpecah. Sedangkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang rendah risikonya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Peraturan ini menggambarkan kepercayaan bahwa pada perusahaan BUMN yang saham mayoritasnya dimiliki oleh pemerintah tidak melakukan penghindaran pajak.

Kata kunci : Penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, koneksi politik, BUMN.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan Negara yang berasal dari iuran wajib rakyat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan Negara. Bagi Negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba sebelum pajak. Perusahaan sering berusaha memperkecil tingkat pembayaran pajak, dengan demikian maka perusahaan dengan sengaja meminimalkan biaya untuk memperoleh laba yang optimal.

Namun, perusahaan harus tetap melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaksanakan semua peraturan perpajakan. Untuk mencapai kepentingan keduanya, salah satu cara yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Tax avoidance* merupakan cara mengurangi pajak yang bersifat legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan tetapi dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Dalam konteks pendapatan Negara, *tax avoidance* telah membuat Negara kehilangan potensi pendapatan Negara yang seharusnya pendapatan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan Negara (Budiman dan Setiyono, 2012). Aktivitas penghindaran pajak dikatakan hal yang unik serta rumit dimana aktivitas ini tidak dilarang karena tidak ada aturan yang dilanggar namun tindakan ini tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiman dan Setiyono, 2012). Tidak adanya aturan yang dilanggar membuat pemerintah tidak melarang tindakan ini namun tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan ini menyebabkan turunnya penerimaan Negara.

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis panjang yang mengakibatkan banyak perusahaan yang akhirnya mengalami kebangkrutan. Penyebab banyaknya perusahaan yang akhirnya tidak beroperasi diduga karena lemahnya tata kelola perusahaan pada saat itu. Oleh sebab itu *corporate governance* mendapat perhatian yang serius baik bagi pemerintah maupun para investor.

Dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen harus selalu diawasi oleh *principal*. Hal ini dilakukan agar setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. *Corporate governance* yang diterapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Selain itu mengawasi setiap keputusan yang diambil dan mengawasi pengelolaan perpajakan. Penerapan *corporate governance* dapat memenuhi kebijakan perusahaan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan diterapkan (Santoso dan Muid, 2014). Perusahaan merupakan wajib pajak dimana perencanaan pajak dipengaruhi oleh bagaimana *corporate governance* diterapkan di perusahaan.

*Corporate governance* yang diterapkan perusahaan mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang terstruktur dengan baik akan membuat *agent* untuk mematuhi segala peraturan yang ada termasuk tidak melakukan tindakan yang agresif terhadap tindakan *tax planning*. Tindakan ini bertujuan agar kinerja *agent* dapat mengalami peningkatan.

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang berisiko sehingga diperlukan kontrol yang baik agar tidak membawa kerugian bagi perusahaan. Buruknya kontrol dari *principal* dapat membuat *agent* melakukan tindakan yang berisiko. GCG akan memberikan bahan pertimbangan setiap keputusan maupun kebijakan yang akan diambil demi keberlangsungan perusahaan.

Dalam proses memaksimalkan keuntungan perusahaan akan muncul konflik kepentingan antar manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang sering disebut *agency problem*. Tidak jarang pihak manajemen perusahaan mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan timbulnya konflik yang biasa disebut sebagai konflik keagenan (*agency conflict*).

Perbedaan tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan pemegang saham (Haruman, 2008). Perbedaan tersebut terjadi karena manajer sering kali lebih mengutamakan kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan-keputusan di dalam menjalankan kegiatan usaha seperti melakukan

penghindaran pajak perusahaan secara agresif tanpa mempedulikan risiko atau kemungkinan-kemungkinan dari tindakan tersebut, sebaliknya bagi pemegang saham hal tersebut sangat berisiko bagi kelangsungan perusahaan dimasa yang akan datang.

Pemegang saham tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang besar atas investasinya di perusahaan. Hal ini memaksa manajemen agar dapat selalu memberikan kinerja yang baik dan menghasilkan keuntungan yang besar. Tekanan untuk selalu memberikan keuntungan yang besar membuat manajemen melakukan berbagai cara termasuk dengan berusaha agar besarnya pajak yang dibayar rendah. Upaya meminimalkan beban pajak yang dijalankan dengan memanfaatkan kekosongan pada peraturan perpajakan disebut sebagai penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan dengan cara melakukan transaksi yang nantinya akan memberikan beban pajak yang rendah. Beberapa cara yang dilakukan antara lain mendirikan anak perusahaan di lokasi yang tarif pajak yang lebih rendah dan melakukan beberapa tindakan seperti *transfer pricing*.

Penelitian mengenai pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa salah satu mekanisme internal GCG yaitu komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Winata (2014) menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen menemukan bahwa berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan. Peneliti lain menggunakan mekanisme eksternal GCG yang dilakukan oleh . Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Zhang dan Jian (2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional jangka pendek berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya yang berbeda membuat peneliti tertarik untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada penelitian ini.

Koneksi politik juga mempengaruhi penghindaran pajak karena dunia bisnis berkaitan erat dengan politik. Keberhasilan suatu bisnis akan dipengaruhi oleh politik dimana bisnis itu berada. Hubungan antara pengusaha di Indonesia terjadi dengan munculnya pengusaha klien, yaitu pengusaha swasta pribumi yang beroperasi dibawah dukungan dan proteksi dibawah jaringan kekuasaan pemerintah. Menurut Purwoto (2011) menyebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik memiliki adanya kedekatan tertentu atau mengusahakan kedekatan tertentu dengan politisi atau pemerintah.

Upaya minimalisasi beban pajak juga dapat dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang kepada bank yang berada pada negara yang pajaknya rendah kemudian menyalurkan dana tersebut kepada anak perusahaan sebagai pinjaman. Hal ini menyebabkan anak perusahaan untuk membayar bunga atas pinjaman tersebut. Bunga yang dibayar ini dapat dikurangkan dalam hal kewajiban pajak perusahaan.

Berbicara mengenai penghindaran pajak tidak dapat dilepaskan dari suatu pandangan bahwa karena tidak ada hukum yang dilanggar, penghindaran pajak seharusnya tidak dilarang. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur urusannya masing-masing sebagaimana dia kehendaki, dan selama tidak ada peraturan yang dilanggar maka otoritas pajak tidak dapat melakukan intervensi.

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *Apple Inc* pada tahun 2014 yaitu, perusahaan teknologi komunikasi terkemuka asal amerika serikat , menghindari pembayaran pajak kepada pemerintah Australia. Hal itu dilakukan dengan membukukan sebagian penjualan produknya di Australia ke sebuah perusahaan yang rahasia bermarkas di irlandia. Hal ini membuat apple hanya membayar porsi terkecil dari beban pajak yang seharusnya.

Aktivitas penghindaran pajak dikatakan hal yang unik serta rumit dimana aktivitas ini tidak dilarang karena tidak ada aturan yang dilanggar namun tindakan ini tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiman dan Setiyono, 2012). Tidak adanya aturan yang dilanggar membuat pemerintah tidak melarang tindakan ini namun tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan ini menyebabkan turunya penerimaan Negara.

Perusahaan dianggap memiliki koneksi secara polik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (setidaknya memiliki 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, mentri atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atau partai politik (Faccio, 2006). Koneksi politik juga dapat dilihat dari apakah pemerintah berkepemilikan langsung apa tidaknya di perusahaan tersebut.

Koneksi politik cenderung diasosikan dengan praktik penghindaran pajak. Dunia bisnis sangat erat kaitannya dengan politik. Hal ini disebabkan karena berhasilnya suatu bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor politik. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Dengan adanya koneksi politik tersebut, maka diharapkan kedua belah pihak akan memperoleh manfaat yang sama. Banyak penelitian-penelitian mencoba menjelaskan pengaruh koneksi politik dengan praktik penghindaran pajak. Kinerja yang dimiliki oleh perusahaan yang dekat dengan pejabat lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak mempunyai kedekatan dengan politikus.

Perusahaan dengan koneksi akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena risiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Kim dan Zhang, 2013). Faktor ini akan semakin mendorong manajemen untuk berusaha mencari cara untuk meningkatkan hubungannya dengan negara atau menjalin hubungan dekat dengan partai politik agar manfaat tersebut diperoleh perusahaan.

Namun, hasil penelitian masih berbeda-beda. Mulyani dan Endang (2013) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan Adhikari *et al* (2006) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Atas latar belakang pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan koneksi politik untuk meminimalisir perilaku penghindaran pajak maka peneliti tertarik untuk meneliti **"Pengaruh Corporate Governace dan koneksi politik terhadap Tax Avoidance"** di perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Apakah kepemilikan manejerial berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak? (2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak? (3) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak? (4) Apakah komite audit berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak? (5) Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi atau teori keagenan adalah teori yang menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang

(agen) dalam bentuk sebuah kerja sama. Pemisahan pemilik dan manajemen dalam literatur akuntansi disebut dengan *Agency Theory* (teori keagenan). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan dalam teori keagenan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Hubungan antar *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan).

Asumsi bahwa para pemegang saham akan bertidak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, maka dengan informasi asimetri tersebut, *agent* dapat mempengaruhi angka angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Adanya *asimetri information* ini menyebabkan kemungkinan munculnya konflik antara pihak *principal* dan *agent*.

### **Corporate Governance**

*Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang undangan dan nilai nilai etika. Thomas (2006) menyebutkan bahwa *good corporate governance* merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

*Corporate Governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau sering kali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan, sehingga dibutuhkan *corporate governance* untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan O'Hara, 2003).

### **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga.

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank dan perusahaan investasi dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi).

### **Dewan Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik.

### Komite Audit

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Komite audit bertugas melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai.

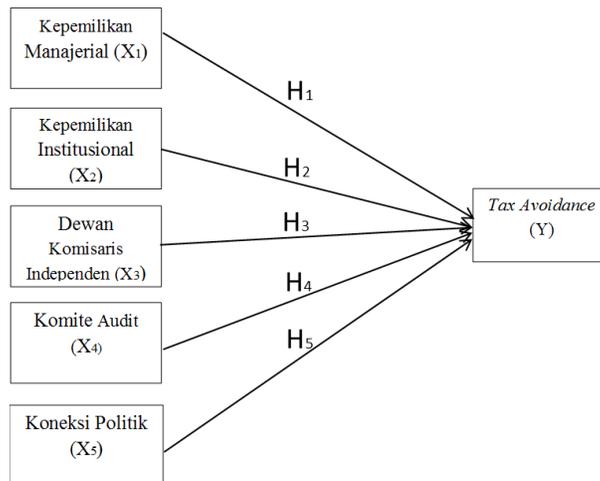
### Tax Avoidance

Pengertian *tax avoidance* adalah upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Setyani, 2004).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Di sisi lain perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat pembayarannya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara ilegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Setyani, 2004).

### Model Penelitian

Berikut ini model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang telah dikembangkan dapat disederhanakan dalam bentuk model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1  
Model Penelitian

### Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance***

Pemegang saham terbesar merepresentasikan kelompok yang memegang kekuatan dalam *voting* di dalam rapat umum pemegang saham, dan memiliki perusahaan, namun tidak mengelola perusahaan. Semakin tinggi presentase pemegang saham terbesar menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menentukan kebijakan perusahaan dan dapat memastikan kebijakan perusahaan dan dapat memastikan kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatkan kepemilikan manajerial akan menyelaraskan atau menyatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga mengurangi perilaku oportunistik. Manajer akan ikut merasakan manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Jao dan Pagalung, 2011). Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Menurut (Annisa dan Kurniasih, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi di luar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

### **Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin besar prosentase dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata. Hasilnya kenaikan prosentase dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan tidak signifikan mempengaruhi kebijakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Penelitian Antonia (2008) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen yang merupakan bagian dari komisaris tidak melakukan fungsi pengawasan secara baik terhadap manajemen. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen akan memaksimalkan kinerja dewan komisaris dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalkan laba perusahaan, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik. Jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka

pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

#### **Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance***

Koneksi politik dapat dipandang sebagai situasi dimana setidaknya satu orang dari *top officer* sebuah perusahaan, pemegang saham besar atau kerabat mereka adalah pemegang jabatan politik tinggi atau seorang politikus menonjol (Faccio, 2006). Perusahaan yang berkoneksi politik ditemukan memiliki kemudahan salah satunya mengenai keringanan pajak (Faccio, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Zhang (2013) menunjukkan koneksi politik yang dimiliki perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Selain itu, Adhikari *et al* (2006) membuktikan melalui penelitian yang dilakukan di Malaysia bahwa hubungan politik berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, dimana semakin kecil tarif pajak efektif perusahaan mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menganalisis data-data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun populasi dalam penelitian terdiri dari perusahaan BUMN selama periode 2012-2016. Dimana penelitian ini melakukan survey ke Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang digunakan sebagai objek penelitian adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.

#### **Teknik pengambilan sampel**

Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling, teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan ukuran sampel dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan BUMN yang telah atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016, (2) Perusahaan yang memiliki data pajak yang lengkap, (3) Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan untuk periode 31 Desember 2012-2016 di dalam website Bursa Efek Indonesia, (4) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah, (5) Perusahaan yang tidak memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) antara 0-1.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu jenis data penelitian berupa arsip yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

litertur, jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, laporan keuangan perusahaan BUMN yang memuat tentang *good corporate governance* (GCG). Laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel selama periode penelitian 2012-2016 data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), sedangkan variabel bebas adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan koneksi politik.

#### Variabel Independen

##### Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola, sehingga pihak manajemen sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan yang dikelolanya.

$$KMAJ = \frac{\text{Total kepemilikan saham manajemen}}{\text{Modal saham perusahaan}}$$

##### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diukur berdasarkan presentase kepemilikan saham oleh institusi.

$$KINS = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham oleh Institusional}}{\text{Seluruh modal saham perusahaan}}$$

##### Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen diukur dari jumlah komisaris Independen pada perusahaan dibandingkan dengan total komisaris yang ada pada perusahaan Yammesri (Dalam Sixpria dan Suhartati, 2013).

$$KIND = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

##### Komite Audit

Komite audit diukur berdasar keberadaanya di dalam perusahaan. Ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan (Isnanta, 2008).

##### Koneksi Politik

Perusahaan dikatakan memiliki hubungan politik jika paling tidak salah satu dari pimpinan perusahaan (dewan komisaris atau dewan direksi), pemegang saham mayoritas atau kerabat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota perlemen atau dekat dengan politisi atau partai (Faccio, 2006). Kepemilikan pemerintah merupakan besarnya porsi saham yang dimiliki oleh pemerintah.

$$KPOL = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pemerintah}}{\text{Jumlah saham biasa}}$$

## Variabel Dependen Penghindaran Pajak

Perusahaan menggunakan proksi pengukuran penghindaran pajak berupa *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan. CETR menjelaskan persentase antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari seluruh total pendapatan sebelum pajak.

### *Cash Effective Tax Rated (CETR)*

CETR adalah efektifitas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2012). CETR dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## Teknik Analisis Data

### Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016:19), analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi).

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mencakup nilai rata-rata (*mean*), deviasi standar, minimum, dan maksimum. Rata-rata (*mean*) bertujuan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum bertujuan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Minimum bertujuan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan.

### Uji Asumsi Klasik

Syarat untuk menggunakan persamaan regresi linier berganda adalah uji asumsi klasiknya terpenuhi. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

### Uji Normalitas

Pengujian normalitas merupakan pengujian tentang kenormalan data dan menggunakan *One Sample Kolmogorov-smirnov*. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Jika variabel residual tersebut memiliki distribusi tidak normal maka hasil uji akan bias. Dasar pengambilan keputusan adalah jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yang ada dalam model regresi ditemukan adanya korelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika,  $VIF > 10$  antar variabel independen terjadi korelasi, sedangkan  $VIF < 10$  antar variabel independen tidak terjadi korelasi

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji koefisien korelasi Spearman's Rho. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji autokorelasi diaplikasikan menggunakan pedoman *Durbin and Watson d-test*.

### Metode Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan karena dapat menjelaskan pengaruh antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$TA = \alpha + \beta_1 KMAJ + \beta_2 KINS + \beta_3 KIND + \beta_4 JKA + \beta_5 KPOL + e \dots$$

Keterangan:

TA	= <i>Tax Avoidance</i> diukur dengan CETR
$\alpha$	= Konstanta
e	= <i>Standart Error</i>
$\beta_1 - \beta_5$	= Koefisien Regresi
KMAJ	= Kepemilikan Manajerial
KINS	= Kepemilikan Institusional
KIND	= Dewan Komisaris Independen
JKA	= Komite Audit
KPOL	= Koneksi Politik

### Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan beberapa cara sebagai berikut:

#### Uji F ( Uji Kelayakan Model)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit* (layak). Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti model regresi tidak *fit*. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa model regresi *fit*.

### Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: a) Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. b) Jika nilai signifikansi  $t < 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran dan Jumlah Sampel Kriteria

Tabel 1  
Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1. Jumlah Perusahaan BUMN tahun 2012-2016	118
2. Perusahaan BUMN yang tidak terdaftar di BEI	(101)
3. Perusahaan yang memiliki data pajak yang tidak lengkap	(2)
4. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang asing	(3)
5. Perusahaan yang tidak memiliki nilai <i>effective tax rate</i> (ETR) antara 0-1	(1)
Jumlah perusahaan yang memenuhi sebagai sample	11
Dikalikan jumlah tahun pengamatan (2012-2016)	5
Total Sample	55

Sumber : Data Sekunder Diolah

Penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2016 yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* sebagai data sampel penelitian. Berdasarkan kriteria sampel dan prosedur sampel diperoleh 11 perusahaan sehingga diperoleh 55 *firm years* yang digunakan dalam penelitian.

### Teknik Analisa Data

#### Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel kepemilikan manajerial (KMAJ), kepemilikan institusional (KINS), komisaris independen (KIND) komite audit (JKA), dan koneksi politik (KPOL) sebagai variabel independen, dan penghindaran pajak yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

**Tabel 2**  
**Analisa Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KMAJ	55	,00	,08	,0055	,04599
KINS	55	,00	,09	,0324	,02283
KIND	55	,25	,71	,4120	,11168
JKA	55	2,00	7,00	4,0364	1,18577
KPOL	55	,51	,90	,6057	,13792
TA	55	,14	,74	,3137	,12236

Sumber : Data Sekunder Diolah 2018

Dari tabel diatas jumlah pengamatan yang diteliti sebanyak 55 *firm years*, berdasarkan 5 periode terakhir laporan keuangan tahunan (2012-2016), dalam statistik deskriptif dapat dilihat bahwa nilai *mean*, serta tingkat penyebaran (standar deviasi) dari masing-masing tabel yang diteliti. Nilai *mean* merupakan nilai yang menunjukkan besaran 55 pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis deskriptif dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

Variabel KMAJ memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang dimiliki oleh PT Semen Gresik, PT Adhi Karya, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, nilai maksimum 0,08 yang dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0055 dan memiliki standar deviasi sebesar 0,0459. Variabel KINS memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang dimiliki oleh PT Adhi Karya, Bank Tabungan Negara, PT Kimia Farma dan memiliki nilai maksimum sebesar 0,09 yang dimiliki oleh Bank Tabungan Negara. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0324 dan standar deviasinya sebesar 0,02283. Variabel KIND memiliki nilai minimum 0,25 yang dimiliki oleh PT Jasa Marga dan nilai maksimum sebesar 0,71 yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 41,20 dan standar deviasinya sebesar 0,11168. Variabel JKA memiliki nilai minimum sebesar 2,00 yang dimiliki oleh PT Adhi Karya dan nilai maksimum sebesar 7,00 yang dimiliki oleh PT Wijaya Karya. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,0364 dan standar deviasinya sebesar 1,18577. Variabel KPOL memiliki nilai minimum sebesar 0,51 yang dimiliki oleh PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan dan nilai maksimum sebesar 0,90 yang dimiliki oleh PT Kimia Farma. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,6057 dan standar deviasinya sebesar 0,13792. Variabel TA memiliki nilai minimum sebesar 0,14 yang dimiliki oleh PT Wijaya Karya dan nilai maksimum sebesar 0,74 yang dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,3137 dan standar deviasinya sebesar 0,12236.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

**Tabel 3**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09612873
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.042
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

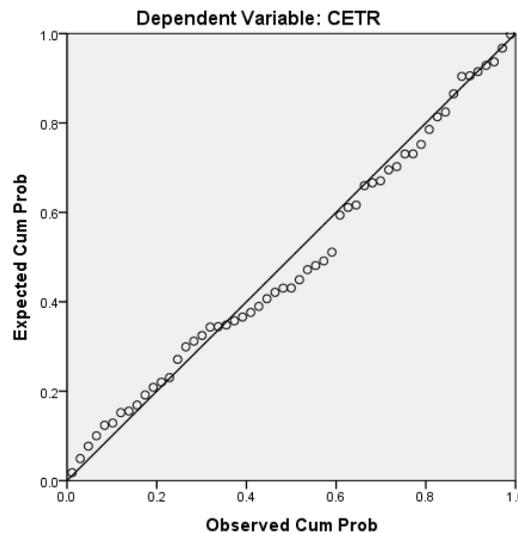
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Sekunder Diolah 2018

Dapat dilihat dari tabel kolmogrov smirnov diatas bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah  $2,00 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan atau diolah berdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian.



Sumber : Data Sekunder Diolah 2018

**Gambar 2**  
**Normal Probability Plot**

Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka asumsi kenormalan terpenuhi.

### Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* diatas 0,10 dan VIF dibawah 10, maka dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas. Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
KMAJ	0.942	1.062
KINS	0.747	1.338
KIND	0.782	1.279
JKA	0.881	1.135
KPOL	0.856	1.168

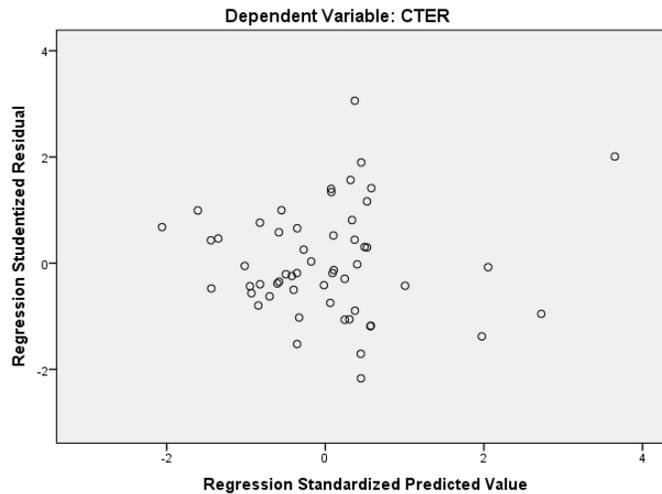
a. Dependent Variable: CETR  
Sumber : Data Sekunder Diolah

Berdasarkan hasil dari tabel 4 diketahui bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada *multikolinearitas* antara variabel independe diatas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat pada gambar *scatterplot*.

Grafik plot yang diperoleh dari hasil olah spss tampak seperti pada gambar 3 berikutnya:



Sumber : Data Sekunder Diolah 2018

**Gambar 3**  
**Grafik Scatterplot**

Hasil dari gambar 3 terlihat bahwa data sampel tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. Data tersebar baik berada diatas maupun di bawah angka sumbu 0 pada sumbu Y. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas

### Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Deteksi adanya autokorelasi bisa dilihat pada tabel *Durbin-Watson* (DW Test).

**Tabel 5**  
Hasil Uji Autokorelasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.619 <sup>a</sup>	.383	.320	.100914	1.816

a. Predictors: (Constant), KAPOL, KIND, KMAJ, JKA, KINS

b. Dependent Variable: CTER

Sumber: Data Sekunder Diolah 2018

Dari pengujian statistik diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.816. Nilai DW berada diantara -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya autokorelasi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui dampak variabel dependen dengan variabel independen. Perhitungan analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan software SPSS yang disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut:

**Tabel 6**  
Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.551	.092		5.984	.000
	KMAJ	3.178	.969	.379	3.278	.002
	KINS	.043	.070	.080	.617	.540
	KIND	.327	.139	.298	2.352	.023
	JKA	-.022	.012	-.211	-1.769	.083
	KPOL	-.075	.108	-.085	-.699	.488

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Sekunder Diolah 2018

Berdasarkan tabel 6 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$TA = 0,551 + 3,178 KMAJ + 0,043 KINS + 0,327 KIND - 0,022 JKA - 0,075 KPOL + e \dots$$

Dari model regresi linear berganda tersebut diketahui adanya pengaruh antara Kepemilikan Manajerial (KMAJ) dan Komisaris Independen (KIND), terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang dilihat dari koefisien regresi  $\neq 0$ .

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi independen terhadap variabel dependen. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.619 <sup>a</sup>	.383	.320	.100914	1.816

a. Predictors: (Constant), KAPOL, KIND, KMAJ, JKA, KINS

b. Dependent Variable: CTER

Sumber : Data Sekunder Diolah 2018

Hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 7 diatas yang menunjukkan bahwa R<sub>square</sub> (R<sup>2</sup>) adalah 0.383. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 38,3% variabel nilai perusahaan (PBV) dapat dijelaskan oleh variabel independen Kepemilikan Manajerial (KMAJ), Kepemilikan Institusional (KINS), Komisaris Independen (KIND), Komite Audit (JKA) dan Koneksi Politik (KPOL). Sedangkan sisanya sebesar 73,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang dianalisis.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model, apakah pemodelan yang dibangun memenuhi kriteria fit atau tidak. Model regresi dikatakan fit apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Kelayakan Model**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.310	5	.062	6.079	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.499	49	.010		
	Total	.809	54			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), KPOL, KIND, KMAJ, JKA, KINS

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2018

Berdasarkan tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa nilai F<sub>hitung</sub> sebesar 6.079 dengan tingkat probabilitas signifikan sebesar  $0.000 < 0.050$  (*level of signifikan*). Maka hipotesis diterima dan berarti model regresi fit atau layak. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak serta dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk menguji apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel independen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara parsial antara Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit dan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berikut ketentuan pengambilan hipotesis: (a) Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Koneksi Politik berpengaruh tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. (b) Jika nilai signifikan uji  $t < 0,05$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap variabel *Tax Avoidance*.

Hasil uji t yang dapat dilihat dalam tabel 9 sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.551	.092		5.984	.000
	KMAJ	3.178	.969	.379	3.278	.002
	KINS	.043	.070	.080	.617	.540
	KIND	.327	.139	.298	2.352	.023
	JKA	-.022	.012	-.211	-1.769	.083
	KPOL	-.075	.108	-.085	-.699	.488

a. Dependent Variable: CETR

Sumber : Data Sekunder Diolah 2018

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat dijelaskan pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut: (a) Variabel Kepemilikan Manajerial (KMAJ) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3.278 dengan tingkat signifikan 0.002 lebih kecil dari batas signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Artinya variabel Kepemilikan Manajerial (KMAJ) berpengaruh positif yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial (KMAJ) mempunyai hubungan yang searah terhadap *Tax Avoidance* dengan demikian  $H_1$  diterima. (b) Variabel Kepemilikan Institusional (KINS) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar .617 dengan tingkat signifikan 0.540 lebih besar dari batas signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima. Artinya variabel Kepemilikan Institusional (KINS) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan demikian  $H_2$  ditolak. (c) Variabel Komisaris independen (KIND) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.352 dengan tingkat signifikan 0.023 lebih kecil dari batas signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Artinya variabel Komisaris independen (KIND) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan demikian  $H_3$  diterima. (d) Variabel Komite Audit (JKA) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1.769 dengan tingkat signifikan 0.083 lebih besar dari batas signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima. Artinya variabel Komite Audit (JKA) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan demikian  $H_4$  ditolak. (e) Variabel Koneksi Politik (KPOL) mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar -.669 dengan tingkat signifikan 0.488 lebih besar dari batas signifikansi ( $\alpha = 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima. Artinya variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, dengan demikian  $H_5$  ditolak.

## Pembahasan

### Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial (KMAJ) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini, ditunjukkan dengan signifikan sebesar 0,002 (lebih kecil dari 0,05) dengan koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 3,178. Hal ini berarti bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen akan berpengaruh terhadap setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan termasuk keputusan terhadap perilaku penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak terhadap kelangsungan perusahaan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ain (2015) dan Putri dan Lautania (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap *Cash effective tax rate* (CETR). Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatkan kepemilikan manajerial akan menyelaraskan atau menyatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga mengurangi perilaku oportunistik. Manajer akan ikut merasakan

manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Jao dan Pagalung, 2011). Semakin besar kepemilikan oleh manajerial, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut kuat. Konsentrasi kepemilikan yang kuat menandakan semakin baik tatakelola perusahaan, sebab semakin besarnya kekuatan pemilik untuk mengontrol manajer dalam pembuatan keputusan. Pemegang saham terbesar dapat digunakan secara optimal sebagai salah satu mekanisme pengontrol masalah agensi, dan meningkatkan kinerja perusahaan.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (KINS) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini, ditunjukkan dengan signifikan sebesar 0,540 (lebih besar dari 0,05) dengan koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,043 artinya bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari.

Kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peran penting untuk mengawasi dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada komisaris independen karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pertama, kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi di luar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi.

Kedua, pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan itu bias memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan atau laba yang akan mereka peroleh pada perusahaan sehingga semua kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan, jika kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik institusional maka mereka akan tetap mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan perusahaan sehingga besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Ketiga, pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan itu bias memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun adanya perilaku manajer dalam hal mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu *tax avoidance*.

### **Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Komisaris Independen (KIND) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini, ditunjukkan dengan signifikan sebesar 0,023 (kurang dari 0,05) dengan koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,327.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Winata (2014) menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen menemukan bahwa berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan.

Komisaris Independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance* (*transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*) Sehingga Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen.

Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistik manajemen terhadap bonus. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalkan terjadinya *Tax Avoidance*.

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Antonia (2008) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen yang merupakan bagian dari komisaris tidak melakukan fungsi pengawasan secara baik terhadap manajemen. Hasil penelitian Antonia (2008) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi laba, sehingga adanya manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh anggota dewan komisaris independen yang semakin besar. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktifitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa komite audit (JKA) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini, ditunjukkan dengan signifikan sebesar 0,083 (lebih besar dari 0,05) dengan koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,022. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan jumlah komite audit independen tidak berdampak pada penghindaran pajak. Adanya anggota komite audit seharusnya dapat memastikan terselenggaranya proses *corporate governance* yang efektif karena mereka memiliki keahlian dan independensi yang memadai.

Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam *tax avoidance*, begitu juga apabila semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif. Kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bias saja pajak agresif atau *tax avoidance* dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan.

Beberapa alasan komite audit perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yaitu: pertama, jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam *tax*

*avoidance*. Kedua, kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bias saja pajak agresif atau *tax avoidance* dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan.

### **Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance***

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial (KMAJ) berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini, ditunjukkan dengan signifikan sebesar 0,488 (lebih besar dari 0,05) dengan koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,075. Koneksi tidak berpengaruh karena perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang rendah risikonya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Peraturan ini menggambarkan kepercayaan bahwa pada perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh pemerintah tidak melakukan penghindaran pajak.

Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan keputusan apapun agar tetap mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Perusahaan yang patuh seringkali mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah sehingga akan meningkatkan citra perusahaan. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hasil penelitian tidak sejalan dengan Mulyani dan Endang (2013) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan Adhikari *et al* (2006) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Dalam memanfaatkan kedekatan dengan partai politik memang memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan namun perusahaan harus memikirkan dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan. Buruknya citra perusahaan akan berdampak jangka panjang sehingga kepercayaan masyarakat akan menurun dan menyebabkan kerugian perusahaan. Koneksi politik dapat dipandang sebagai situasi dimana setidaknya satu orang dari *top officer* sebuah perusahaan, pemegang saham besar atau kerabat mereka adalah pemegang jabatan politik tinggi atau seorang politikus menonjol (Faccio, 2006).

Perusahaan yang berkoneksi politik ditemukan memiliki kemudahan salah satunya mengenai keringanan pajak (Faccio, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Zhang (2014) menunjukkan koneksi politik yang dimiliki perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Selain itu, Adhikari *et al* (2006) membuktikan melalui penelitian yang dilakukan di Malaysia bahwa hubungan politik berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, dimana semakin kecil tarif pajak efektif perusahaan mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit) dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 11 perusahaan pada tahun 2012-2016. Jumlah data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 55 *years firm*.

Variabel Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen akan berpengaruh terhadap setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan, termasuk keputusan terhadap perilaku penghindaran

pajak (*tax avoidance*) karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak terhadap kelangsungan perusahaan.

Variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional hanya mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada komisaris independen karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh manajemen termasuk dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Variabel Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa jumlah komisaris independen akan mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan karena Komisaris Independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang dipilih secara transparan dan independen. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penhindaran pajak (*tax avoidance*).

Variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah komite audit tidak mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Jumlah anggota komite audit yang terlalu banyak berakibat kurang baik bagi perusahaan karena adanya banyak tugas atau pekerjaan yang terpecah. Hal ini menyebabkan anggota komite audit kurang fokus dalam menjalankan tugasnya.

Variabel Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti besar kecilnya koneksi tidak berpengaruh karena perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang rendah reiskonya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Peraturan ini menggambarkan kepercayaan bahwa pada perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh pemerintah tidak melakukan penghindaran pajak. Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan keputusan apapun agar tetap mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh.

## Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: (1) Bagi Perusahaan diharapkan lebih memperhitungkan segala risiko yang harus ditanggung dari setiap kebijakan yang diambil. Perusahaan diupayakan mampu menerapkan *Good Corporate Governance* secara optimal agar tindakan yang merugikan perusahaan dapat diminimalisir. (2) Bagi Fiskus agar lebih meningkatkan pengawasan kegiatan penghindaran pajak yang diperbolehkan. (3) Bagi Penelitian selanjutnya dapat menambah proksi untuk penghindaran pajak yang lain, karena setiap proksi dapat merefleksikan hal yang berbeda, dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. (4) Dalam penelitian ini hasil R<sup>2</sup> yang diperoleh tergolong rendah yaitu 0,383 atau 38,3% , sisanya 61,7% karena pengaruh variabel lain. Peneliti selanjutnya diharapkan memakai variabel yang lebih relevan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, A., D. Chek, dan Z. Hao. 2006 . Public Policy, Political Connection, And Effective Taz Rates: Longitudinal Evidence From Malaysia. *Journal Of Accounting And Public Policy*, 25: 574-595.
- Ain, Q. 2015. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4(12): 1-15.
- Annisa, N. A. dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8(2): 95-189.
- Antonia, E. 2008. Analisis Pengaruh Reputasi Auditor, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Leverage Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Komite Audit Independen Terhadap Manajemen Laba. *Karya Ilmiah*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Budiman, J., dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Simposium Nasional Akuntanasi XV Banjarmasin*.
- Faccio, M. 2006. Politically Connected Firms. *The American Economic Review* 96(1): 369-386.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kedelapan. Badan penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Haruman, T. 2008. Struktur Kepemilikan, Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Finance and Banking Journal* 10(2): 150-165.
- Isnanta. 2008. Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Skripsi*. Universitas Islam Yogyakarta. Yogyakarta.
- Jao, R. dan G. Pagalung. 2011. Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8(1).
- Jensen, M., dan W. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360
- Kim, C. dan L. Zhang, 2013. Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Working Paper*. City University of Hong Kong. Hongkong.
- Macey, J. dan M. O'Hara. 2003. The Corporate Governance of Bank, Federal Reserve Bank of New York. *Economic Policy Review* 9(1): 91.
- Mulyani, D., dan M. Endang. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek tahun 2008-2012). *Jurnal perpajakan* 2(1).
- Putri, C. L. dan M. F. Lautania. 2016. Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Raatio, Ownership Structure Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1(1):101-119.
- Purwoto, L. 2011. Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham. *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Santoso, T. dan D. Muid. 2014. Pengaruh Corporate governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting* 3(4): 2337-3806

- Setyani, R. 2004. Deterrent Effect Penyidikan Pajak Asia Agri Group Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri dan Perkebunan Kelapa Sawit. *Tesis*. Program Master Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sixpria, N. dan T. Suhartati. 2013. Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Praktik Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus: Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Simposiun Nasional Akuntansi XVI*. Manado.
- Suyanto, K. D., dan Supramono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2 (16): 167-177.
- Thomas, S. K. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 8(1): 1-9.
- Winata, F. 2014. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013. *Jurnal perpajakan* 4(1).
- Zhang, H. dan M. Jian. 2012. How Does State Ownership Affect Tax Avoidance? Evidence from China. *Working paper*. School of Accountancy, Singapore Management University. Singapore.